

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep administrasi

1. Pengertian administrasi

Administrasi berasal dari bahasa Belanda yakni *Administratie* yang berarti kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Administrasi dalam pengertian luas dapat ditinjau dari sudut proses, fungsi, dan dari sudut kepranataan (*institution*). Ditinjau dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses yang dimulai dari proses pemikiran, perencanaan, pengaturan, penggerakkan, pengawasan sampai dengan proses pencapaian tujuan. Ditinjau dari sudut fungsi atau tugas, administrasi berarti keseluruhan tindak (aktivitas) yang mau atau tidak mau harus dilakukan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok orang-orang yang berkedudukan sebagai administrator atau manajemen puncak suatu organisasi usaha. Sedangkan administrasi dari sudut kepranataan atau institusi, administrasi berarti kelompok orang-orang yang secara tertentu melakukan aktivitas-aktivitas di dalam organisasi.

Menurut **White** dalam **Handyaningrat (1990:2)** memberikan pendapatnya mengenai:

Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale, etc.
(Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat

pada semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha yang besar atau kecil dan sebagainya)

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses yang umumnya terdapat dalam semua jenis usaha kelompok dan dengan skala tertentu.

Menurut **Newman** dalam **Handyaningrat (1990: 2)** memberikan pendapatnya mengenai:

Administration has been defined as the guidance, leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goal. (Administrasi didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dari pada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama)

Bersadarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama.

2. Pengertian administrasi negara

Menurut **Waldo** yang dikutip oleh **Kahya dkk (1996 : 3)**, mengemukakan definisi administrasi Negara, sebagai berikut :

- a. Administrasi Negara ialah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan pemerintah.**
- b. Administrasi Negara adalah ilmu dan seni manajemen yang dipergunakan untuk mengurus urusan-urusan Negara.**

Jadi berdasarkan teori di atas administrasi Negara adalah gabungan antara organisasi dan seni manajemen yang dipergunakan untuk mengurus urusan Negara.

Administrasi negara juga merupakan bagian ilmu politik yang mempelajari penentuan kebijaksanaan negara dalam suatu proses. Oleh sebab itu, sebagai suatu ilmu yang diperoleh dari kedua pengetahuan ini, administrasi negara menghendaki dua macam syarat jika hendak di pahami. Pertama, perlu mengetahui sesuatu mengenai administrasi umum. Kedua, harus diakui bahwa banyak masalah administrasi negara timbul dalam kerangka politik.

Sedangkan Administrasi Negara menurut **waldo (1983:9)** mendefinisikan :

Administrasi negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, administrasi negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Jadi berdasarkan teori di atas administrasi Negara merupakan seni dan ilmu organisasi dan manajemen manusia untuk mengatur urusan-urusan Negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Pengertian Organisasi

Pengertian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam yakni organisasi sebagai alat dari pada manajemen dan organisasi sebagai fungsi organisasi. Organisasi sebagai alat berarti organisasi sebagai wadah, sebagai tempat manajemen, sehingga memberikan bentuk bagi manajemen yang memungkinkan manajemen dapat bergerak. Sedangkan organisasi sebagai fungsi adalah organisasi dalam arti dinamis (bergerak) yaitu organisasi yang memberi kemungkinan tempat manajemen dapat bergerak dalam batas-batas

tertentu. organisasi dalam arti dinamis berarti, bahwa organisasi itu bergerak mengadakan pembagian pekerjaan.

Menurut **Mooney** dalam **Soekarno (1980: 75)** memberikan pendapatnya mengenai: *“Organization is the form of every human association for the attainment of a common purpose. (Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai suatu maksud bersama atau tujuan umum)”*.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah bentuk persekutuan, perserikatan, perkumpulan, pengelompokan manusia dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Sedangkan menurut **Barnard** dalam **Soekarno (1980: 75)** memberikan pendapatnya mengenai: *“Organization as a system of cooperative activities of two or more persons. (Organisasi adalah suatu sistem mengenai usaha-usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih)”*.

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu sistem perihal usaha-usaha, tindakan-tindakan, atau aktivitas-aktivitas kerja sama yang dilakukan minimal oleh dua orang atau lebih.

4. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari kata *“management”* yang dapat diterjemahkan dalam berbagai istilah, seperti kepemimpinan, tata pimpinan ,

ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan dan lain sebagainya.

Menurut **Makharita** dalam **Handayaniingrat (1980: 19)** memberikan pendapatnya mengenai:

Management is the utilization of available or potentials resources in achieving a given ends. (manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensi dalam pencapaian tujuan)

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dititikberatkan pada usaha menggunakan atau memanfaatkan sumber yang tersedia atau yang berpotensi dalam pencapaian tujuan. Adapun yang dimaksud dengan management resources antara lain: orang (*man*), uang (*money*), material (*material*), peralatan/mesin (*machine*), metode (*method*), waktu (*time*), dan prasarana lainnya, yaitu tanah, gedung, alat dan sebagainya.

Menurut **Degenars** dalam **Handayaniingrat (1980: 19)** memberikan pendapatnya mengenai:

Management is defined as a process dealing with a guided group activity and based on distinct objectives which have to be achieved by the involment of human and non-human resources. (Managemen didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia)”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen dititikberatkan pada bimbingan kegiatan kelompok. Dalam pencapaian tujuan kelompok ini pengguna sumber daya manusia adalah

sangat penting, sekalipun sumber-sumber daya lainnya tidak boleh diabaikan. Landasan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, diperlukan tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan dan memecahkan masalah penelitian tersebut. Adapun landasan teori yang peneliti jadikan acuan untuk pembahasan

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Pengertian kebijakan

Menurut **Friedrich** yang dikutip oleh **Suyatna (2009:3)** mengemukakan sebagai berikut :

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada yang diusulkan oleh seseorang, kelompok/pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Jadi berdasarkan teori di atas kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok atau pun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh **Wahab (1997:2)** mengemukakan: **“Kebijakan merupakan suatu perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”**

Jadi berdasarkan teori di atas kebijakan adalah perilaku semua orang yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu.

2. Pengertian kebijakan publik

Dasar pembentukan kebijakan publik adalah kepentingan publik, akan tetapi tidak mudah untuk merumuskan apa dan manakah suatu kepentingan yang benar benar kepentingan bersifat publik. Karena yang disebut kepentingan publik ialah kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Konsep kebijakan menitikberatkan pada yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud. Hal tersebut yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara alternatif yang ada, menyangkut kebijakan tersebut banyak ahli yang menyamakan arti kebijakan dengan kebijaksanaan sebagai terjemahan dari kata policy.

Friederich menyatakan pengertian kebijakan yang dikutip oleh **Agustino (2012:7)** yaitu:

Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan- kemungkinan (kesempatan- kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Berdasarkan teori diatas penulis berpendapat bahwa kebijakan merupakan bagian dari tindakan dengan maksud dan tujuan tertentu , kebijakn melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan, bagaimanapun juga kebijakan harus

menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kemudian peneliti juga mengungkapkan pengertian kebijaksanaan yang mengacu pada pendapat **Koontz** yang dikutip oleh **Hasibuan (1990:99)** adalah sebagai berikut:

General statement of understanding that guide thinking in decision making. Their function is to mark out an area in which decision can be made, thus leading some assurance that decision will be consistent with and contribute to goals or objective. (kebijaksanaan adalah pernyataan-pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan berfikir dalam menentukan keputusan. Fungsinya adalah menandai lingkungan disekitar keputusan yang dibuat, sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan menyokong tercapainya arah atau tujuan).

Sedangkan menurut **Dunn** dalam **pasolong (2011:39)** mengatakan bahwa:

Kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang – bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Kebijakan sebagai studi haruslah diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur pengaturan dan atau paksaan, sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, yang berbeda adalah

bagaimana *respons* terhadap masalah tersebut. Respons ini yang disebut sebagai kebijakan publik.

3. Pengertian implementasi kebijakan

Studi Implementasi merupakan suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks, Teori dari pendapat para ahli mengenai Pengertian implementasi kebijakan menurut **Nugroho (2003:139)** yaitu: **“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”**. Dalam proses implementasi kebijakan selalu terjadi kemungkinan perbedaan antara yang diharapkan pembuat kebijakan dengan apa yang kenyataannya dicapai.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas oleh **Lester dan Stewart** yang dikutip oleh **Winarno (2002:101)** yaitu:

Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama- sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Peneliti mengungkapkan pengertian implementasi yang mengacu pada pendapat **Meter** dan **Horn** yang di kutip oleh **Wahab (2002:65)** mengungkapkan bahwa :

Implementasi kebijakan sebagai “those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions.” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan).

Landasan teori menurut **Mazmanian dkk**, dalam **Agustino (2012:139)**

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Pendapat dari **Putra (2001:84)** menyampaikan hakekat dari implementasi kebijakan sebagai berikut :

Implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan tindakan atau perilaku badan- badan administratif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (target group), namun juga memperhatikan secara cermat jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu Implementasi kebijakan. Hal ini dinyatakan oleh **Mufiz**, dalam **Kahya dkk (1996:54)** sebagai berikut :

Implementasi kebijakan adalah aktifitas- aktifitas yang dilakukan untuk melakukan suatu kebijakan secara eksekutif. Kesulitan pada tahap ini adalah sukarnya menentukan kebijakan, karena tidak adanya dampak yang terantisipasi sebelumnya.

Tujuan- tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan negara/ pemerintah, tidak terlihat hasilnya tanpa adanya implementasi dari kebijakan. Implementasi merupakan salah satu sarana dalam melihat berhasil atau tidaknya pencapaian- pencapaian tujuan- tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Definisi implementasi kebijakan yaitu pendapat yang dikemukakan oleh **Mazmanian dan Sabatier** dalam **Agustino, (2012:139)** yaitu :

Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai , dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan keputusan kebijaksanaan yang dibentuk berdasarkan undang undang, atau perintah dan peraturan yang dibuat guna mengetahui masalah yang akan diselesaikan dan apa yang harus dilakukan.

Sedangkan menurut **Meter dan Horn**, dalam **Agustino (2012:139)**, mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut :

Tindakan- tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat- pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan- tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh **Lester dan Stewart** dalam **Agustino (2012: 139)** yaitu : **“Bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output)”**.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Adapun pendapat menurut **Grindle** dalam **Agustino (2012:139)**, yaitu sebagai berikut:

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya dalam pencapaian tujuan. Adapun pendapat menurut **Udoji** dalam **Agustino (2012:140)** yaitu :

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan,

kebijakan- kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Landasan teori Menurut Williams yang dikutip oleh Wahab (2005:61), bahwa:

Efektifitas implementasi kebijakan berkaitan dengan *implementation capacity* dari pada aktor kebijakan yaitu kemampuan melaksanakan kebijakansedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai.

4. Indikator implementasi kebijakan

Indikator telah dikembangkan untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yang dikembangkan oleh Meter dan Horn dalam Agustino (2012: 142) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika- dan- hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio- kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan Atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi . tahap- tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolittik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber- sumberdaya tersebut nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan, tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya lain yang perlu

diperhitungkan juga, ialah sumberdaya finansial, dan sumberdaya waktu.

3. **Karakteristik agen pelaksana**
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
4. **Sikap/ kecenderungan para pelaksana**
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan.
5. **Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana.**
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan, begitu pula sebaliknya.
6. **Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.**
Hal terakhir perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan permasalahan dilapangan yang lebih sesuai maka peneliti memilih indikator Menurut **Edward III** yang dikutip oleh **Winarno (2002:149)** sebagai berikut: “1.) komunikasi; 2.) sumber daya; 3.) disposisi; 4.)struktur birokrasi”.

Indikator implementasi kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dicapai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, diantaranya : Transmisi penyaluran komunikasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam saluran komunikasi adalah adanya salah pengertian dikarenakan komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Ketidak- jelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tatanan tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Konsistensi, yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah suatu konsistensi dan jelas.

2. Sumberdaya

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff. Diperlukan staff yang ahli dan mampu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Yang kedua adalah informasi, informasi berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementator harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan.

3. Disposisi

disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketika dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan yang ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana dan terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumberdaya-sumberdaya yang menjadi tidak efektif dan menjadi penghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana

sebuah kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi.

5. Tahap- Tahap Kebijakan

Menurut **Dunn** dalam **Pasolong (2011:41)** mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan, tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun penjelasan tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

3) Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Di sini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5) Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

C. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan

dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut pendapat **Mahmudi (2005:92)** mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: **“Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”**

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Berikut hubungan arti efektivitas:

Gambar 2.1.
Hubungan Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber: **Mahmudi, (2005:92)**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya

dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat **Drucker** yang dikutip **Moenir (2006:166)** yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done". (Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan).

Memperhatikan pendapat para ahli di atas dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Menurut pendapat **Zahnd (2006:200)**, mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut: **"Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya"**

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut **Kurniawan (2005:109)** mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Menurut pendapat **Gibson** yang dikutip oleh **Sutrisno (2010:133)** mengemukakan bahwa **“efektifitas adalah konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”**.

Pengertian efektivitas dikemukakan pula oleh **siagian (1982:151)**, yaitu : **“penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan”**.

Menurut **Steers (1980:12)** , memberikan pengertian efektivitas sebagai berikut:

Efektivitas adalah pengukuran dalam artian sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah, kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan

gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaiannya tujuan dari aktivasi- aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Landasan teoritis berikutnya mengenai efektivitas yang dikemukakan oleh **Emerson** dalam **Handayani** (1985:16) yaitu:

Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak.

Pendapat ahli di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian tujuan atau sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran.

Peneliti mengemukakan pula mengenai efektivitas suatu organisasi yang menurut **schein**, yang dikutip oleh **Tika** (2005:129) menjelaskan bahwa **“efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tersentu yang dimilikinya”**

efektivitas organisasi yang menurut **Robbins** dalam **Tika** (2005: 129), menjelaskan bahwa **“efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang”**

Mengacu pada penjelasan diatas dalam organisasi sangat menentukan untuk pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Untuk itu faktor keefektifannya banyak mempengaruhi kepada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Indikator Efektivitas

Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dari efektivitas pada suatu organisasi, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekaa banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara- cara meningkatkan efektivitas kerja ini dalam suatu organisasi. berikut ini dikemukakan penjelasan ukuran atau kriteria efektivitas menurut **Gibson dkk (1989 : 34)** indikator efektivitas dapat diukur :

- 1. Produktivitas yaitu merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.**
- 2. kualitas yaitu suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.**
- 3. Efisiensi yaitu merupakan perbandingan (ratio) antara *output* dengan *input*.**
- 4. fleksibilitas respons terhadap suatu organisasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu organisasi.**
- 5. kepuasan yaitu merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.**
- 6. keunggulan yaitu kemampuan bersaing dari organisasi dan anggota organisasi terhadap perubahan-perubahan yang ada.**
- 7. Pengembangan yaitu merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.**

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran

efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai serta menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

Ukuran- ukuran untuk efektivitas, menurut **Siagian (1997:153)** mengemukakan ukuran ukuran efektivitas sebagai berikut :

1. **Ukuran waktu, yaitu berapa lama seseorang yang memperoleh jasa untuk memperolehnya**
2. **Ukuran harga, dalam arti nenerapa seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkannya itu**
3. **Ukuran nilai- nilai social budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada klientelnya**
4. **Ukuran ketelitian yang menunjukkan apakah jasa yang diberikan akuran atau tidak.**

Berdasarkan perbandingan indikator menurut para ahli diatas peneliti mengambil indikator menurut **Duncan** karena indikator tersebut lebih relevan dengan masalah yang ada dilapangan, pendapat **Duncan** dalam **Steers (1980:50)** yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian ini, yaitu:

1. **Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses, oleh karena itu agar pencapaian tjuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari factor yaitu : kurun waktu , dasar hukum, dan sasaran yang merupakan target konkret.**
2. **Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, prosedur dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi menyangkut proses sosialisasi.**
3. **Adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan faktor peningkatan kemampuan, proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.**

Efektivitas dilihat dari aspek penerimaan pajak didalam organisasi dan manajemen berarti keberhasilan atau kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diukur berdasarkan pendekatan proses dan hasil.

D. Hubungan Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penerimaan

Keterkaitan antara implementasi kebijakan pajak progresif dengan efektivitas penerimaan pajak daerah seperti telah dibahas pada bab 1 bahwa implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri, dan disini kita berbicara tentang keefektivan implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah suatu organisasi akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya, Kebijakan dapat dikatakan diimplementasikan secara efektif jika benar dan menimbulkan dampak atau perubahan perubahan positif sebagaimana yang diharapkan seperti meningkatnya penerimaan pajak.

Adapun yang menggambarkan adanya kaitan antara implementasi kebijakan dengan efektivitas penerimaan pendapatan pajak yang dikemukakan oleh **Islamy (2000:107)** yang menyatakan bahwa :

Suatu kebijakan negara akan efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi anggota- anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian deengan apa yang diinginkan

oleh pemerintah atau negara. Dengan demikian kalau mereka tidak bertindak atau berbuat sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara itu, maka kebijakan negara menjadi tidak efektif.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan sangat menentukan apakah suatu organisasi akan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut sebelumnya, pengaruh antara implementasi kebijakan dengan efektivitas penerimaan pendapatan daerah disampaikan oleh Nugroho (2003: 179) dalam bukunya “**Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi**” sebagai berikut:

Jadi, memang tidak ada model pilihan lain yang terbaik. Yang kita miliki adalah pilihan- pilihan model yang harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan kebijakannya sendiri. Namun ada satu hal yang paling penting, yakni implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektivan dari kebijakan itu sendiri. Disini kita berbicara tentang keefektivan implementasi kebijakan.

Menurut Williams yang dikutip oleh Wahab (2005:61), bahwa:

Efektifitas implementasi kebijakan berkaitan dengan *implementation capacity* dari pada aktor kebijakan yaitu kemampuan melaksanakan kebijakansedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat tercapai.

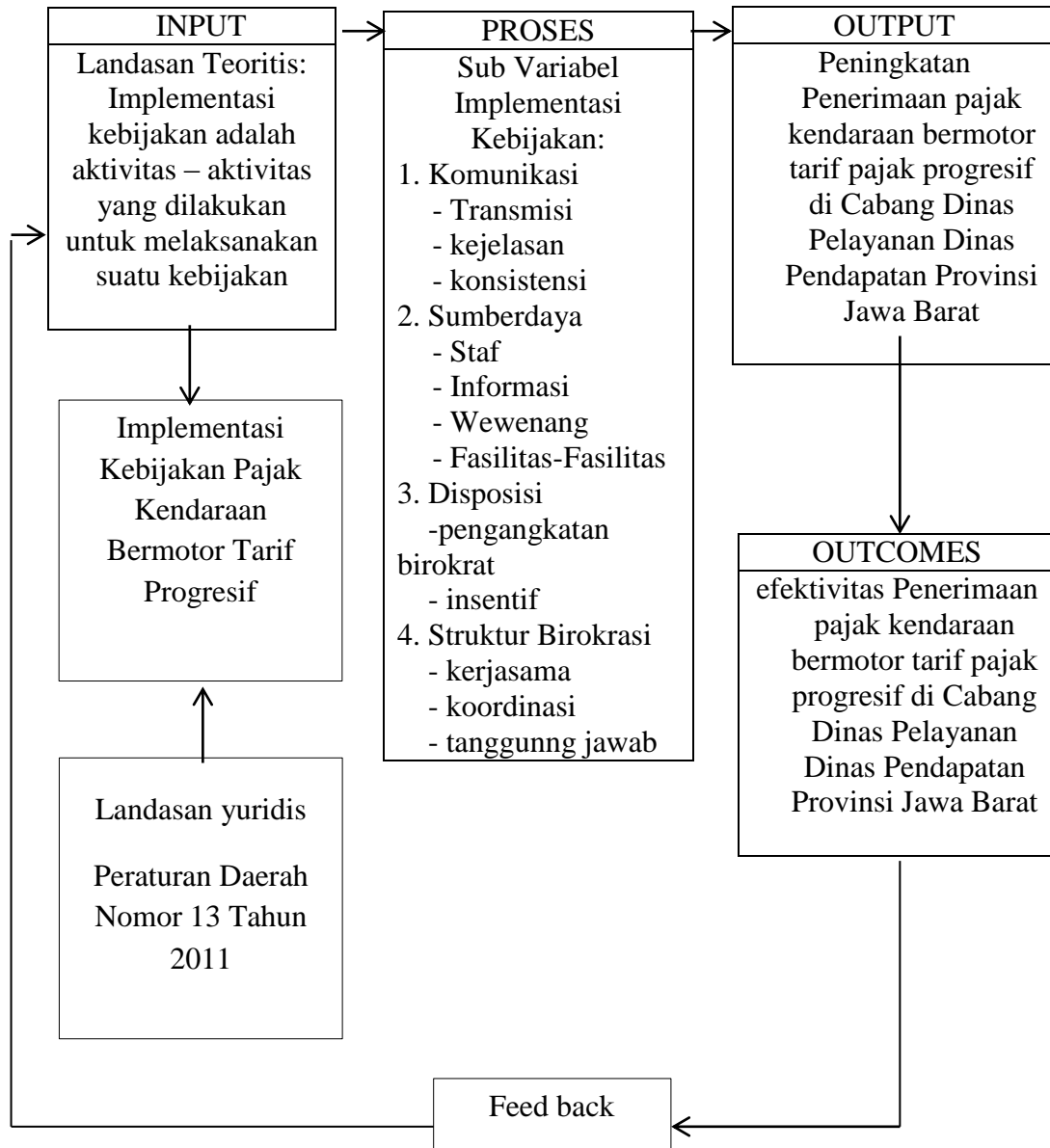
Menurut Nugroho (2003:179) mengemukakan bahwa: **“efektivitas organisasi implementasi kebijakan mencakup empat tepat yaitu tepat kebijakannya, tepat pelaksanaannya, tepat targetnya dan tepat lingkungannya”.**

Pertama adalah apakah kebijakannya sudah tepat, Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauhmana kebijakan yang telah ada hal hal yang memang

memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, yang kedua adalah tepat pelaksanaannya, ada 3 lembaga yang menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama pemerintah- masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diwastakan, yang ketiga adalah tepat target yaitu apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan klien, yang ke empat adalah tepat lingkungan ada 2 lingkungan yang saling menentukan yaitu lingkungan kebijakan sebagai lingkungan internal, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan lembaga lain yang terkait disebut sebagai lembaga endogen, lingkungan kedua eksternal kebijakan yang disebut variabel exogen yang terdiri dari publik opinion yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretive institutions yang berkenaan dengan interpretasi dengan lembaga- lembaga strategis dalam masyarakat, dan individual yaitu individu individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pada teori keterkaitan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan bahwa secara konseptual implementasi kebijakan memiliki keterkaitan yang signifikan dengan efektivitas,

Keterkaitan implementasi kebijakan dengan target penerimaan lebih lanjutnya peneliti akan menggambarkan dalam bentuk pendekatan sistem pada gambar berikut:



Sumber : Winarno (2002:126), Siagian (1997:153), Modifikasi Peneliti.

Gambar 2.2

Model Pendekatan Sistem Implementasi Kebijakan Dengan Efektivitas Penerimaan Pendapatan

Penjelasan:

1. Input (masukan)

Adalah suatu masukan dalam suatu sistem pendekatan yang dapat dijadikan suatu bahan yang berguna untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki. Implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor tarif progresif merupakan input bagi tercapainya efektivitas penerimaan pendapatan daerah secara optimal dimana terdapat dua landasan yang mendukung terhadap implementasi kebijakan pajakkendaraan bermotor tarif progresif tersebut. Landasan- landasan tersebut diantaranya:

- a) Landasan teoritis, dimana landasan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah aktifitas- aktifitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakn secara efektif.
- b) Landasan praktis, dimana implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor tarif progresif ini tertuang dalam suatu prodak kebijakan yaitu peraturan daerah provinsi jawa barat no. 13 tahun 2011 tentang pajak daerah.

2. Process (proses)

Proses ini, sumber- sumber dalam input diupayakan untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif yang berdasarkan variabel- variabel implementasi kebijakan, yang terdiri dari : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga efektivitas penerimaan dapat tercapai.

3. Output (keluaran)

Hasil dari proses adalah berupa penerimaan pendapatan daerah pada pajak kendaraan bermotor tarif progresif dapat dilakukan secara efektif. Variabel – variabel implementasikan kebijakan yang dilakukan dengan baik menyebabkan target penerimaan pendapatan daerah dapat tercapai.

4. Outcomes

efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tarif progresif sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam mengimplementasikannya telah dilaksanakan secara efektif yang menyebabkan tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.

5. Feed back (umpan balik)

Memperbaiki kekurangan pada implementasi kebijakan dengan peraturan daerah nomor 13 tahun 2011 diharapkan dapat memberikan umpan balik atau masukan terhadap efektivitas penerimaan pendapatan daerah berupa perbaikan kembali mengenai sosialisasi terhadap wajib pajak kendaraan bermotor tarif progresif dan prosedur pelayanan yang lebih dipermudah sehingga tujuan dari implementasi kebijakan pajak kendaraan bermotor tarif progresif yaitu efektivitas penerimaan pajak lebih optimal.

E. Pengertian pajak progresif

Definisi atau pengertian pajak menurut **Soemitro** dalam **Hafidiah** dan **Sumartaya (2013:1)**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

berdasarkan teori di atas adalah pemasukan kepada Negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam pasal 7 ayat point a, b, dan c bahwa pada sarannya guna memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan azas kemampuan lebih atas kepemilikan kedua dan seterusnya. peraturan pajak kendaraan bermotor progresif, yaitu tarif pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan persentase yang naik dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki sebagai dasar pengenaan pajak, Yaitu kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu atas nama dan alamat yang sama, baik kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dikenakan tarif objek pajak secara progresif. Tarif pajak progresif diantaranya:

- a) kendaraan pertama 1,7% dari DPP
- b) kendaraan kedua 2,25% dari DPP
- c) kendaraan ketiga 3,25% dari DPP
- d) kendaraan kelima dan seterusnya 3,75% dari DPP

DPP yaitu dasar pengenaan pajak, yaitu nilai jual kendaraan bermotor x bobot, yang dimaksud berdasarkan PERGUB (bukan nilai jual kendaraan

dipasaran umum). Untuk penentuan urutan kendaraan pada urutan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan tanggal kwitansi saat pendaftaran kendaraan (baru maupun bekas), sedangkan kena pajak progresif dikenakan dari motor ke motor dan dari mobil ke mobil bukan dari motor ke mobil atau sebaliknya.

Adapun perhitungan pajak progresif dengan asumsi 2 kendaraan jenis yang sama yaitu:

a) mobil ke-1 (pajak normal) PKB = 1,75% x NJKB x bobot

$$1,75\% \times \text{Rp.}100.000.000, ' = \text{Rp.}1.750.000, '$$

$$\text{SWDKLLJ} = \underline{\text{Rp. } 143.000, ' +}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp.}1.893.000, '$$

b) mobil ke-2 (pajak progresif) PKB = 2,25% x NJKB

$$2,25\% \times \text{Rp.}100.000.000, ' = \text{Rp.}2.250.000, '$$

$$\text{SWDKLLJ} = \underline{\text{Rp. } 143.000, ' +}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp.}2.393.000, '$$

Keterangan : Njkb (Nilai Jual Kendaran Bermotor)

Swdkllj (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Maka perhitungan pajak progresif dari mobil ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya perhitungannya sama seperti rincian diatas, makin banyak memiliki kendaraan pribadi atas nama dan alamat yang sama, semakin besar pajak progresifnya.